

UPAYA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN DALAM MENEMPUH AKREDITASI LEMBAGA SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Annisa Widya Fahrani^{a*}, Carlis Purnia^b, Rahma Tuzahra^c, Retno Wulandari^d

^{a,b,c,d} Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: annisawidyaf388@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

13 Juni 2022

Revised

14 Juni 2022

Accepted:

16 Juni 2022

Online available:

18 Juni 2022

Keywords :

Upaya Pengelola,
Akreditasi Lembaga,
Standar Nasional
Pendidikan

*Management Efforts,
Institutional
Accreditation, National
Education Standards*

*Correspondence:

Name : Annisa Widya

Fahrani

E-mail:

annisawidyaf388@gmail.com

Abstrak

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kurang dari 5% dari 121.895 lembaga Kelompok Bermain di Jawa Barat terakreditasi. Hal ini mengidentifikasi bahwa penyelenggaraan Kelompok Bermain belum sesuai standar nasional pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan upaya dan hambatan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam menempuh akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sesuai standar nasional pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan penelitian adalah pengelola Kelompok Bermain menunjukkan bahwa : (1) pengelola memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki, baik tenaga, biaya, waktu, dana dan melakukan mentoring yang intensif kepada sesama lembaga Kelompok Bermain yang telah sukses meraih akreditasi lembaga, dan (2) hambatan yang dialami pengelola adalah keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengisian data akreditasi secara daring, kurang tertibnya dalam melakukan pendokumentasian penyelenggaraan Kelompok Bermain, keterbatasan dana operasional lembaga dan belum memahami sepenuhnya isi dari dokumen Standar Nasional Pendidikan. engelolaan program Kelompok Bermain (KB) merupakan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang baik serta dapat berguna untuk orang lain. Pengelolaan meliputi hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program mulai dari perencanaan sampai evaluasi kelompok bermain. Program kelompok bermain sekarang ini dirasa penting dalam pembelajaran sebelum memasuki jenjang berikutnya karena anak dapat bereksplorasi sesuai dengan minat karakteristik anak masing-masing. Kelompok Bermain Muslimat NU 14 yang berlokasi di Kecamatan Blimbing Kota Malang yang berjalan selama 7 tahun, namun sudah mengalami banyak perubahan baik positif maupun negatif, oleh karena itu perlu diketahui pengelolaan KB Muslimat NU 14 sebagai wadah pendidikan untuk anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dalam program Kelompok Bermain yang meliputi 5 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan tahap evaluasi program. Pengelolaan tersebut dibagi dalam sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, administrasi, dan pembelajaran. Peneliti ingin melaksanakan tahapan penelitian secara mendalam dengan metode penelitian deskriptif yang terarah melalui pendekatan studi kasus tertuju pada pengelolaan program KB pada KB-TK Muslimat NU 14 Polowijen. Alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang mendeskripsikan dan menggambarkan pengumpulan data dalam bentuk narasi atau uraian.

Abstract

The background of this research problem is that less than 5% of the 121,895 Playgroup institutions in West Java are accredited. This identifies that the implementation of the Play Group is not yet in accordance with the national education standards. The purpose of this study is to describe the efforts and obstacles of the management of the Anak Mulia Play Group in Cibogo Village, Lembang District, West Bandung Regency in taking accreditation as an effort to improve the quality of implementation according to national education standards. The research method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. The conclusion of this research is that Playgroup managers show that: (1) managers need serious efforts, by mobilizing their resources, including energy, costs, time, funds and conducting intensive mentoring to fellow Play Group institution that have successfully achieved accreditation institutions, and (2) the obstacles experienced by managers are the limited ability to fill in accreditation data online, the lack of order in documenting the implementation of Play Groups, limited operational funds for the institution and not fully understand the contents of the National Education Standards document. The management of the Play Group (KB) program is a joint effort to achieve good goals and can be useful for others. Management includes matters relating to program implementation, from planning to evaluation of playgroups. The playgroup program is now considered important in learning before entering the next level because children can explore according to the interests of each child's character is ties. The NU 14 Muslimat Play Group located in Blimbing District, Malang City which has been running for 7 years, but has under gone many changes, both positive and negative, the refore it is necessary to know the management of the Muslimat NU 14 KB as an educational forum for early childhood. This study aims to describe the management in the Playgroup program which includes 5 stages, namely the planning stage, the organizing stage, the implementation stage, the supervisionstage, and the program evaluation stage. The management is divided into human resources, facilities and infrastructure, financing, administration, and learning. Researcher swanto carryout in-depth research stages withdes criptive research method that are directed through a case study approach focus don't he management to ft hefamily planning program atthe KB-TK Muslimat NU 14 Polowijen. The data collection too luse disaninter view guide and the analys is us edis a descriptive analys is that describes and describes the data collection in theform of a narrative or description.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan layanan pendidikan bagi anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar (Santrock, 2011). Terdapat tiga jalur layanan PAUD (Sofia, 2013), yaitu PAUD formal, yaitu Taman Kanak-kanak, dan Raudhotul Atfal, dan PAUD nonformal, yaitu Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD nonformal sejenis, dan informal yaitu layanan PAUD pada lingkungan masyarakat dan keluarga (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2013). Berbagai studi membuktikan bahwa dampak PAUD bagi perkembangan anak sangat berpengaruh bagi keberhasilan pendidikan selanjutnya maupun saat seorang anak memasuki dunia kerja. Usia anak saat di PAUD (0 s.d. 6 tahun) merupakan usia emas (*golden age*) terhadap perkembangan kecerdasan anak (Helmawati, 2015).

Dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAU, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan lembaga PAUD, khususnya Kelompok Bermain makin menjamur di masyarakat. Kesadaran, semangat dan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan lembaga Kelompok Bermain perlu disikapi dengan bijak, karena belum diimbangi dengan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD nonformal (Depdiknas, 2013). Karena pada hakekatnya akreditasi merupakan tujuan antara yang harus diraih setiap lembaga dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan, kualitas lulusan, dan kredibilitas lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan upaya dan hambatan pengelola Kelompok Bermain meraih akreditasi lembaga untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan sesuai Standar Nasional Pendidikan (Ibrahim dan Syaodih, 2003; Kathleen, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) pada Kelompok Bermain Anak Mulia Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Data dikumpulkan dengan wawancara yang dilakukan pada tiga orang pengelola dan dua orang pendidik. Selain itu dilakukan pengamatan lapangan terhadap proses pembelajaran, kelengkapan administrasi, alat permainan edukatif, media belajar, suasana lingkungan sekitar Kelompok Bermain, dan analisis terhadap dokumentasi penyelenggaraan. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan validasi dan *triangulasi* untuk mendapatkan keyakinan terhadap data yang diperoleh, khususnya data yang meragukan sebelum ditarik kesimpulan. Sedangkan analisisnya datanya dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga yang menjadi sasaran studi kasus dalam penelitian ini adalah Kelompok Bermain Anak Mulia di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Lembaga ini berdiri tanggal 14 Februari 2013 dengan NPSN: 61957092 dan Ijin Operasional Lembaga Nomor: 421.1/186.10/PAUDNI-

Disdikpora/2015. Saat ini Kelompok Bermain tersebut dikelola oleh 3 orang dan pendidik 2 orang, dengan jumlah peserta didik 22 orang. Jumlah lulusan yang dihasilkan sejak berdiri adalah 132 orang. Selama 7 tahun penyelenggaraan Kelompok Bermain Anak Mulia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya dengan menempuh akreditasi lembaga sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan kajian terhadap dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap pengelola dan pendidik diperoleh gambaran mengenai berbagai upaya yang dilakukan dalam menyiapkan dokumen akreditasi. Karena proses akreditasi Kelompok Bermain merupakan kegiatan pengumpulan dokumen yang diperlukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan nonformal. Dokumen yang harus dipersiapkan dalam akreditasi berupa perencanaan program, format-format, formulir, panduan, instruksi kerja, prosedur, dan buku-buku administrasi. Dokumen juga dapat berupa rekam jejak dan proses dan hasil pelaksanaan kerja lembaga yang dapat berupa catatan, grafik perkembangan, foto, piagam penghargaan, piala dan produk yang dihasilkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan temuan lapangan terhadap pengelola dan pendidik Kelompok Bermain Anak Mulia menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pengelola antara lain dengan mengikuti sosialisasi tentang gambaran proses dan substansi yang diakreditasi, mempelajari borang-borang akreditasi, konsultasi dengan lembaga sejenis yang sudah memperoleh akreditasi, konsultasi dengan Penilik Kecamatan Lembang, Pamong Belajar pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat, dan nara sumber yang memahami akreditasi yang dikoordinir oleh Himpaudi Kabupaten Bandung Barat dan Gugus Kelompok Bermain.

Proses penyiapan dokumen akreditasi yang dilakukan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia bukan hanya berorientasi pada pemenuhan secara administratif, melainkan menyiapkan tenaga yang membantu input data akreditasi secara online. Beberapa dokumen yang disiapkan antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Kelompok Bermain. Dokumen ini memuat arah dan tujuan penyelenggaraan PAUD yang menyangkut filosofis dan masa depan anak didik. Pendidikan tidak hanya bagaimana proses pembelajaran berlangsung menurut kaidah-kaidah instruksional, tetapi harus memiliki ruh yang menaungi seluruh aktivitas proses penyelenggaraan di lembaga tersebut (Wahyuningsih, dkk., 2015).

Berdasarkan temuan lapangan tersebut bahwa sesungguhnya akreditasi merupakan upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pengelola dan pendidik harus memiliki komitmen bahwa pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat yang dipenuhi pada instrument akreditasi merupakan upaya yang secara nyata dilakukan dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain. Akreditasi juga merupakan upaya umpan balik bagi pengelola dan pendidik, serta orangtua peserta didik terhadap kekuatan dan keterbatasan dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain (Sari, 2019). Jika memiliki kekuatan, maka dipertahankan dan dimanfaatkan untuk

pengembangan lembaga, tetapi jika terdapat keterbatasan dan hambatan, umpan baliknya adalah perlu diperbaiki, disempurnakan dan diatasi sehingga penyelenggaraan Kelompok Bermain lebih baik. Dengan proses akreditasi maka menjadi akuntabilitas dan kredibilitas lembaga Kelompok Bermain kepada masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat diperoleh pengakuan dan apresiasi yang proporsional terhadap keberadaan lembaga dari pemerintah maupun dari masyarakat (Fitzsimons, 2017).

Peran pengelola Kelompok Bermain sangat dominan dalam proses akreditasi, karena untuk memenuhi dan melengkapi dokumen akreditasi tidak dapat dilakukan dengan waktu cepat, karena dokumen yang disajikan bukan saja yang berkenaan dengan legal formal berupa gedung, sarana prasana, dan buku-buku administrasi, melainkan juga menampilkan dokumentasi rekam jejak apa-apa yang sudah dilakukan dan prestasi apa saja yang sudah diraih. Lembaga Kelompok Bermain dan lembaga PAUD nonformal pada umumnya didirikan atas dasar inisiatif memberikan layanan PAUD seluas-luasnya kepada anak usia dini pada masyarakat sekitar, bahkan dengan pengelola dan pendidik yang kurang atau tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. Bahkan banyak lembaga Kelompok Bermain diselenggarakan di gedung atau ruangan yang sesungguhnya bukan diperuntukan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan yang sewaktu-waktu diambil alih dan dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya dari pemilik gedung dan ruangan tersebut, seperti gedung atau ruang Balai Desa, balai RW, rumah penduduk, masjid/mushola, dan balai pertemuan. Keadaan ini menghambat upaya pengelola dalam melakukan akreditasi oleh karena salah satu syarat dalam akreditasi berkenaan dengan keberadaan, status, perijinan dan kelengkapan dari gedung dan ruangan kegiatan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Upaya pengelola untuk meraih akreditasi lembaga membutuhkan kerja keras agar memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam delapan Standar Nasional Pendidikan PAUD pendidikan nonformal. Berdasarkan temuan lapangan hambatan pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia dalam menempuh akreditasi lembaga sebagai berikut ini.

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Pengelola belum sepenuhnya memahami konsep, substansi dan menilai tolok ukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai SKL Kelompok Bermain oleh karena latar belakang pendidikan bukan dari S1 PAUD, bahkan satu orang pendidik lainnya yang lulusan SLTA. Walaupun secara dokumentatif tersedia di lembaga, tetapi mereka saat ditanya tentang SKL lebih lanjut masih belum memahami secara mendalam dan kaitannya dengan standar isi, standar proses dan standar-standar lainnya. Walaupun demikian karena pengelola sudah pernah mengikuti Diklatsar Pendidik PAUD dan sering mengikuti berbagai pertemuan teknis dengan penilik dan Himpaudi, pengelola mulai makin memahami tentang SKL. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:

- a. Nilai agama dan moral;
 - b. Fisik motorik;
 - c. Kognitif;
 - d. Bahasa; dan
 - e. Sosial emosional.
2. Standar Isi (SI)

Sama halnya pemahaman tentang SKL, pengelola belum secara mendalam memahami materi dan ruang lingkup secara detil tentang SI. Sehingga berdampak pada kegiatan perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran (Wijana, dkk., 2010). Standar isi dalam suatu kurikulum mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menyokong pendidikan untuk membangun serta mengidentifikasi suatu hal yang menjadi poin penting yang akan diajarkan di sekolah dan apa yang menjadi aktifitas yang akan peserta didik kerjakan
 - b. Standar isi menjadi sebuah panduan dalam pembelajaran, kurikulum dan penilaian yang bermakna Standar isi dapat menyediakan struktur yang jelas bagi pembelajaran dan kurikulum
3. Standar proses

Secara umum pengelola memahami urutan proses pembelajaran dan bagaimana menata sentra-sentra pembelajaran yang mendukung materi yang akan dibelajarkan, tetapi belum memiliki wawasan yang memadai terhadap berbagai metode pembelajaran, strategi motivasi dan penanganan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan manajemen kurikulum yang pada akhirnya mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah, meskipun penetapan standar masih terkait pada tiga masalah utama yang melekat pada sistem pengelolaan pendidikan yakni, kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.

Proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar, mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Konsep pembelajaran berbeda dengan pengajaran, pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru kepada siswa saja tapi lebih luas lagi.

Ada suatu tahapan yang harus dilalui siswa yang terdiri dari learn, unlearn dan relearn. Unlearn didefinisikan sebagai mencoba melupakan atau membuang suatu ingatan atau pengetahuan, membuang sesuatu yang semula dipelajari, seperti kebiasaan lama, dan tidak perlu memikirkannya, biarlah yang berlalu tetap berlalu, *lets bygones be bygones*. Relearn didefinisikan sebagai mempelajari sesuatu kembali, seperti halnya karena telah lupa atau mengabaikannya.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kriteria yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan bahwa Pendidik harus berkualifikasi S1 kependidikan dan pengelola minimal SLTA. Dari data yang ada, untuk syarat pengelola telah dipenuhi, karena 3 orang pengelola telah memiliki pendidikan minimal SLTA, dan untuk pendidik 1 orang lulusan S1 Pendidikan Luar Sekolah dan 1 orang lulusan SLTA.

5. Standar sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil pengamatan dan data dokumentasi Kelompok Bermain Anak Mulia telah memenuhi syarat dan memenuhi kondisi sarana dan prasarananya, baik alat permainan dalam maupun luar, juga sarana pendukungnya seperti tempat parkir dan halaman. Standar sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai suatu penyesuaian bentuk, baik spesifikasi, kualitas, maupun kuantitas sarana dan prasarana sekolah dengan kriteria minimum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik serta meningkatkan kinerja penyelenggara sekolah. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar sarana dan prasarana pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

6. Standar pengelolaan

Secara umum pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia telah melakukan pengelolaan dengan baik, tetapi hambatannya para pengeola, sehingga administrasi lembaga kurang tertangani dengan tertib. Beberapa dokumensudah tersedia, tetapi lebih banyak tidak terisi.

Tujuan standar pengelolaan Sebagai salah satu standar pendidikan nasional, standar pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan sekolah/madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya. fungsi standar pengelolaan adalah sebagai berikut. (1) Sebagai acuan untuk mengelola sistem pendidikan di tingkat sekolah/madrasah, baik dari sisi kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, dan sebagainya. (2) Memudahkan sekolah/madrasah dalam mengembangkan rencana kerja tahunan. (3) Sebagai pedoman seluruh warga sekolah/madrasah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.

7. Standar pembiayaan

Sumber pembiayaan secara rutin dari Kelompok Bermain Anak Mulia adalah berasal dari iuran peserta didik sebesar Rp.60.000/ bulan. Uang sebesar tersebut sangat terbatas untuk membiayai operasional penyelenggaraan termasuk insentif pendidik. Sedangkan untuk pengelola tidak mendapatkan insentif, karena keterbatasan dana. Sumber pembiayaan lain diperoleh dari bantuan Bantuan Operasional Pendidikan PAUD dari Kemdikbud melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu kelompok Bermain Anak Mulia pernah menjadi lembaga ujicoba pengembangan model PAUD dari PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Sehingga dengan dijadikan lokasi ujicoba, maka Kelompok Bermain Anak Mulia memperoleh bantuan dana sekaligus mendapat bimbingan teknis para pendidiknya dari Pamong Belajar PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Standar pembiayaan Pendidikan merupakan proses yang dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Levin (1987) pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Nanang Fattah biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan

8. Standar penilaian pendidikan

Pendidik telah melakukan penilaian sesuai dengan tumbuh-kembang anak berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, hambatan dalam hal tindak lanjut hasil penilaian belum dipantau dan diamati secara mendalam untuk perbaikan pembelajarannya, baik dalam pembelajaran di kelas maupun untuk ditindaklanjuti oleh orangtua peserta didik di rumah (Renti, 2019). Kedelapan hambatan dalam penerapan Standar Nasional Pendidikan Kelompok Bermain Anak Mulia menunjukkan bahwa pengelola perlu upaya kerja keras untuk meraih akreditasi lembaga. Selain memperkuat kerja tim antara pengelola dan pendidik, membangun kerjasama dengan dengan penilik dan sesama pengelola, menyaipkan pendanaan yang memadai, kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup, ketekunan dalam mendokumentasikan kegiatan, dan prestasi yang diraih, serta kemampuan teknologi dan informasi dalam melakukan input data secara online pada server Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (Depdiknas, 2013).

KESIMPULAN

Simpulan penelitian adalah pengelola Kelompok Bermain Anak Mulia pada kasus yang diteliti menunjukkan bahwa : (1) pengelola memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melakukan pendokumentasian penyelenggaraan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan yang dipresyaratkan, melakukan mentoring yang

intensif kepada sesama lembaga Kelompok Bermain yang telah sukses meraih akreditasi lembaga, dan (2) hambatan yang dialami pengelola adalah keterbatasan kemampuan dalam melakukan pengisian data akreditasi secara online, kurang tertibnya dalam melakukan pendokumentasian penyelenggaraan Kelompok Bermain, keterbatasan dana operasional lembaga dan belum memahami sepenuhnya isi dari dokumen Standar Nasional Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2013. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemeterian pendidikan dan Kebudayaan.
- Depdiknas. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasinal. Fitzsimons, C. 2017. *Community Education and Neoliberalism*. Switzerland: Springer International Publishing AG.
- Helmawati. 2015. *Mengenal dan Memahami PAUD*. Bandung: Rosda.
- Nurhasanah, Windi Miranti, & Retno Wulandari. (2022). Pengelolaan Keuangan Lembaga Kelompok Bermain KB AMALIA. *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(01 Juni), 58–67. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.com/index.php/JIMR/article/view/208>
- Ibrahim, R., dan Syaodih S. N. 2003. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kathleen, G. 2013. *A Community Education Initiative to Improve Using Online Health Information: Participation and Impact*. United Kingdom: Informa Healthcare.
- Renti, O. 2019. Evaluasi Hasil Akreditasi Lembaga PAUD se-Kota Depok. *JECE (Journal of Early Childhood Education)*. 1(2), 16-28.
- Santrock, J. W. 2011. *Masa Perkembangan Anak*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sari, P. 2019. Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal Tinta*, 1 (1), 117-133.
- Sofia, L. T. 2013. Formal - Nonformal – Informal Education. *Procedia Social and Behavior Science*. Science Direct.
- Vesi Tri Septiani, Retno wulandari, Esi Maharani, & Alya Zakia. (2022). Pengelolaan Pendirian Kelompok Bermain (KB). *JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(01 Juni), 46–57. Diambil dari <https://azramedia-indonesia.com/index.php/JIMR/article/view/207>
- Wahyuningsih, S., Herlianthi, S. L., Arlina, dan Yamin, F. 2015. *Model Strategi ASI dalam Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Inklusif*. Bandung: PP PAUD dan Dikmas Regional 1.
- Wijana, W. D., Suminah, E., Numiati, dan Siyantayani, Y. 2010. *Kurikulum Pendidikan Anak usia Dini*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.